

PENGARUH SEKTOR RIIL DAN SEKTOR KEUANGAN TERHADAP INFLASI DI INDONESIA

Armayanti^{1*}, Cut Zakia Rizki²

- 1) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
e-mail: armayanti223@gmail.com
- 2) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
e-mail: z.rizki@gmail.com

Abstract

This research aimed to analyze impact of real sector (price of rice and crude oil prices) and financial sector (money supply and BI Rate) to inflation in Indonesia. Analysing methods used in this research is Ordinary Least Square (OLS) by using time series yearly data from 2000 to 2014. The result indicate that price of rice and crude oil prices have a positive but not significant to inflation in Indonesia. While BI Rate has a significant positive to inflation in Indonesia. These findings are expected monetary authorities be careful in their policy related to interest rate in controlling inflation in Indonesia. Make sure the policy is capable responded by commercial banks in order to run the policy effective to controlling inflation in Indonesia.

Keywords: *Inflation, Real Sector, Financial Sector, OLS.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sektor riil (harga beras dan harga minyak dunia) dan sektor keuangan (JUB dan BI Rate) terhadap inflasi di Indonesia. Model analisis yang digunakan dalam penelitian adalah *Ordinary Least Square* (OLS) dengan menggunakan data *time series* tahunan 2000-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif namun tidak signifikan antara variabel harga beras dan harga minyak dunia terhadap inflasi di Indonesia. Sementara variabel BI Rate mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Berdasarkan temuan ini diharapkan otoritas moneter berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan tingkat suku bunga dalam pengendalian inflasi di Indonesia. Pastikan kebijakan tersebut mampu direspon oleh bank-bank umum agar kebijakan tersebut benar-benar efektif untuk dijalankan dalam pengendalian inflasi di Indonesia.

Kata Kunci : *Inflasi, Sektor Riil, Sektor Keuangan, OLS*

PENDAHULUAN

Dalam indikator ekonomi makro, ada tiga hal penting yang menjadi pokok permasalahan perekonomian, pertama adalah masalah pertumbuhan ekonomi, kedua masalah inflasi dan ketiga adalah masalah pengangguran (Mankiw N. G., 2006). Tujuan utama dari semua pembangunan ekonomi suatu negara adalah kesejahteraan masyarakat. Namun untuk mencapai hal tersebut banyak terdapat permasalahan yang harus dihadapi, salah satunya adalah inflasi.

Secara umum inflasi dapat disebabkan karena dua hal yang pertama *demand pull inflation* yaitu inflasi yang disebabkan oleh tarikan permintaan dan yang kedua *cost push inflation* yaitu inflasi yang disebabkan oleh harga barang-barang yang meningkat sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Berfluktuasinya inflasi di Indonesia dengan beragam faktor yang mempengaruhinya menyebabkan kesulitan dalam pengendalian inflasi. Untuk itu dalam pengendaliannya pemerintah harus mengetahui dengan jelas faktor-faktor yang menyebabkan inflasi di Indonesia. Khusus dalam penelitian ini penulis akan membahas pengaruh beberapa variabel dari sisi sektor riil dan sektor keuangan terhadap inflasi di Indonesia.

Sektor riil sangat berkaitan dengan proses produksi hingga distribusi barang dan jasa. Pengendalian dari sektor riil sangat ditentukan oleh kebijakan fiskal yang dijalankan oleh pemerintah. Di sektor riil meningkatnya inflasi akan menurunkan daya beli masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah karena pengeluaran masyarakat lebih banyak tersedot untuk belanja bahan makanan. Kenaikan harga makanan akan berdampak pada penurunan kualitas hidup. Hal ini tentu saja merupakan permasalahan yang akan dialami negara mengingat kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama suatu negara.

Salah satu komoditas pertanian yang mempunyai bobot besar terhadap pengeluaran rumah tangga untuk bahan makanan di Indonesia sehingga perlu untuk dicermati adalah beras. Beras merupakan salah satu makanan kebutuhan pokok di Indonesia sehari-hari. Beras merupakan komoditas penting yang masuk dalam penghitungan inflasi secara nasional. Kenaikan harga beras dapat berpengaruh (merembet) pada kenaikan harga barang lain sehingga dapat menyebabkan kenaikan harga barang secara keseluruhan. Kenaikan harga beras yang terlalu tinggi bahkan dapat membahayakan perekonomian Indonesia (Saputra, 2013).

Selain itu, khusus dari sisi penawaran pergerakan dari harga minyak dunia sangat berpotensi mendorong inflasi mengingat Indonesia merupakan negara pengekspor minyak mentah dan disisi lain Indonesia merupakan negara pengimpor minyak jadi, sehingga apabila terjadi fluktuasi harga minyak dunia maka akan mempengaruhi biaya produksi yang pada akhirnya akan menyebabkan *cost push inflation* (Maggi & Saraswati, 2013).

Selain sektor riil yang mempunyai peranan dalam inflasi di Indonesia, sektor keuangan juga ikut andil dalam penciptaan inflasi di Indonesia. Pengendalian di sektor keuangan sangat ditentukan dari kebijakan moneter yang dijalankan pemerintah. Dalam hal ini, bank sentral merupakan satu-satunya pihak yang mengendalikan inflasi dari sisi moneter. Bank sentral suatu negara umumnya menggunakan tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga untuk mengurangi uang yang berputar di masyarakat. Khusus Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan (*BI rate*) sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi (Saputra, 2013).

Selain itu, menurut pandangan monetaris penyebab utama inflasi adalah kelebihan penawaran uang dibandingkan yang diminta oleh masyarakat. Sedangkan golongan non monetaris yaitu Keynesian, tidak menyangkal pendapat pandangan monetaris tetapi menambahkan bahwa tanpa ekspansi uang beredar, kelebihan permintaan agregat dapat saja terjadi jika terjadi kenaikan pengeluaran konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah atau ekspor netto. Dengan demikian inflasi dapat disebabkan oleh faktor-faktor moneter dan non

moneter (Sutawijaya & Zulfahmi, 2015). Dalam penelitian ini fokus pada faktor moneter yaitu jumlah uang beredar.

TINJAUAN PUSTAKA

Sektor Riil

Stabilisasi makroekonomi memiliki tiga tujuan pokok, yakni: (1) mengendalikan tingkat inflasi yang terlampau tinggi dan cenderung tidak terkendali; (2) memperbaiki keseimbangan fiskal melalui pengurangan anggaran belanja pemerintah, peningkatan pendapatan pemerintah melalui kenaikan pajak; (3) menghapus defisit neraca transaksi berjalan melalui pengendalian nilai tukar mata uang domestik (devaluasi) dan penggalakan ekspor (Suryana, 2000).

Menurut Sukirno (2013) untuk menghindari lonjakan inflasi dari kenaikan harga-harga barang tersebut maka diperlukan suatu kebijakan fiskal dari pemerintah untuk menurunkan pengeluaran masyarakat. Yang pertama dengan menaikkan pajak rumah tangga sehingga mengurangi pendapatan masyarakat yang dapat dibelanjakan untuk keperluan konsumsi. Kedua adalah dengan mengurangi pengeluaran pemerintah yang pada gilirannya juga turut mengurangi pengeluaran dari masyarakat. Kedua cara ini selanjutnya akan mengurangi inflasi.

Sektor Keuangan

Sektor keuangan merupakan bagian dari perekonomian yang berkaitan dengan transaksi-transaksi dari lembaga keuangan (*Financial Institution*). Dalam pengendalian inflasi, selain menggunakan kebijakan dari sisi fiskal juga digunakan kebijakan dari sisi moneter. Kebijakan moneter yaitu kebijaksanaan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan cara mempengaruhi penawaran uang dalam masyarakat atau dengan cara mempengaruhi tingkat suku bunga (Suryana, 2000).

Peningkatan penawaran uang cenderung merangsang perluasan aneka kegiatan ekonomi karena jumlah uang yang dipegang oleh masyarakat bertambah sehingga memungkinkan mereka untuk mengkonsumsi barang atau jasa lebih banyak. Hal ini tentu akan terus menggerakkan roda perekonomian karena permintaan akan barang dan jasa yang besar akan meningkatkan produksi.

Kaum monetaris mengemukakan bahwa dengan mengendalikan pertumbuhan jumlah uang beredar, maka pemerintah akan dapat mengatur kegiatan-kegiatan perekonomian sekaligus mengendalikan tingkat inflasi.

Pandangan lain dari Keynesian menyatakan peningkatan dari penawaran uang akan meningkatkan ketersediaan dana yang dapat dipinjamkan (*loanable funds*). Apabila kelebihan tingkat penawaran dana melebihi permintaannya akan menurunkan tingkat suku bunga yang selanjutnya akan mendorong kenaikan permintaan dari investasi. Hal ini akan meningkatkan permintaan agregat yang membawa perekonomian ke arah yang lebih tinggi. Namun jika mulai terjadi inflasi, maka pemerintah dapat menerapkan kebijakan moneter “ketat” (pengurangan jumlah uang beredar) dengan cara menaikkan tingkat suku bunga dengan harapan dapat mengurangi lonjakan inflasi.

Inflasi

Inflasi adalah suatu kondisi dimana tingkat harga meningkat secara umum dan terus menerus (Mishkin, 2001). Hal ini berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Inflasi mencerminkan stabilitas harga. Semakin rendah nilai suatu inflasi berarti semakin besar adanya kecenderungan ke arah stabilitas harga. Namun masalah inflasi tidak hanya berkaitan dengan melonjaknya harga suatu barang dan jasa, inflasi juga berkaitan dengan daya beli (*purchasing power*) dari masyarakat. Sedangkan daya beli masyarakat sangat tergantung pada upah riil. Inflasi sebenarnya tidak terlalu bermasalah jika kenaikan harga diiringi dengan kenaikan upah riil.

Secara umum, inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif, tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, menurut kebanyakan ahli ekonomi inflasi tersebut justru mempunyai pengaruh yang positif bagi perekonomian dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (*hiperinflasi*) keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian menjadi lesu, orang menjadi tidak semangat bekerja, menabung atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat, para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh akan kewalahan mengimbangi harga sehingga hidup juga menjadi semakin terpuruk dari waktu ke waktu.

Indeks Harga

Indeks harga adalah perbandingan harga rata-rata dari tahun yang sedang dihitung dengan penggunaan harga rata-rata pada tahun dasar.

Indeks harga terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Indeks harga produsen

Yaitu indeks yang menunjukkan fluktuasi harga dari hasil-hasil pertanian di pedesaan dan seberapa besar nilai tukar dari produk tersebut.

2. Indeks harga perdagangan besar

Yaitu indeks yang menunjukkan harga dari barang-barang dengan skala yang banyak atau besar seperti hasil pertanian, pertambangan, industri, ekspor dan impor.

3. Indeks harga konsumen

Yaitu indeks yang menggambarkan harga dari barang-barang eceran yang dibeli masyarakat untuk kebutuhan konsumsi seperti pangan, sandang, perumahan, dan barang serta jasa. Indeks ini memunculkan jenis indeks baru yaitu Indeks Bahan Pokok yang terdiri dari beras, ikan asin, minyak goreng, minyak tanah, gula pasir dan lain-lain.

Untuk pengukuran inflasi dari seluruh indeks harga tersebut, IHK lebih banyak digunakan sebagai variabel penelitian. Kegunaan penyusunan IHK dan inflasi yaitu: (1) untuk menghitung perkembangan sekelompok barang dan jasa; (2) sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian masalah buruh dengan majikan dalam hal pengupahan/gaji; (3) untuk penyesuaian harga apabila terjadi fluktuasi inflasi yang signifikan; (4) dalam penghitungan PDRB/PDB digunakan untuk penilaian harga konstan; (5) dalam dunia perbankan digunakan untuk menentukan suku bunga (Hasibuan, 2009).

Pembangunan yang berkelanjutan selain ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga ditandai oleh terpeliharanya stabilitas ekonomi. Indikator pokok dari stabilitas ekonomi adalah laju inflasi yang diukur oleh perkembangan Indeks Harga Konsumen (Kadiman, 2005).

Penawaran Uang

Orang memegang uang untuk membeli barang dan jasa. Semakin banyak uang yang dibutuhkan untuk bertransaksi, maka semakin banyak uang yang akan dipegang. Irving fisher mengemukakan hubungan tersebut dalam persamaan berikut yang juga sering disebut sebagai persamaan kuantitas:

$$\text{Uang} \times \text{Perputaran} = \text{Harga} \times \text{Transaksi}$$
$$M \times V = P \times T$$

Sisi kanan dari persamaan merupakan transaksi. T merupakan total jumlah transaksi selama satu periode. P adalah harga dari setiap transaksi. Sementara di sisi kiri menyatakan uang yang digunakan untuk melakukan transaksi. M adalah uang. V adalah perputaran uang transaksi dan mengukur tingkat dimana uang bersikulasi dalam perekonomian.

Penawaran uang (*money supply*) merupakan jumlah uang yang tersedia dalam kegiatan ekonomi suatu negara atau yang sangat sering disebut sebagai jumlah uang beredar. Penawaran uang M1 yaitu uang beredar yang sering digunakan untuk keperluan transaksi, dengan demikian M1 terdiri dari:

1. Uang koin/logam dan uang kertas yang biasa disebut dengan uang kartal.
2. Uang giral atau uang bank, yaitu deposito yang terdapat di bank-bank umum dan dapat dikeluarkan dengan menggunakan cek, jenis uang ini disebut uang dalam arti sempit.

Penawaran uang M2 yaitu merupakan jumlah uang beredar dalam arti luas. M2 disebut juga *Broad Money* terdiri dari M1 (uang logam, uang kertas, uang giral/cek) ditambah dengan uang *near money*. *Near money* adalah rekening tabungan dan kekayaan yang ditukarkan atau dicairkan menjadi uang kontan atau *liquid* tanpa kehilangan nilainya.

Jadi total penawaran uang atau jumlah uang beredar adalah:

$$M2 = M1 + \text{Near Money}$$

Milton Friedman mengemukakan bahwa penambahan penawaran uang dapat menimbulkan kenaikan harga maupun kenaikan pendapatan nasional riil (Sukirno, 2004). Golongan monetaris berpendapat bahwa pemerintah perlu mengatur penawaran uang agar inflasi dapat dihindari dan perekonomian dapat berkembang dengan teguh. Artinya golongan monetaris berpendapat bahwa kebijakan moneter merupakan alat yang efektif untuk mengendalikan kegiatan ekonomi.

BI Rate

Suku Bunga Bank Indonesia atau yang biasa disebut *BI rate* adalah suku bunga acuan Bank Indonesia dan merupakan sinyal dari kebijakan moneter Bank Indonesia. *BI rate* adalah tingkat suku bunga instrumen yang berupa seperti sinyal oleh Bank Indonesia yang ditetapkan pada RDG (Rapat Dewan Gubernur) secara bulanan bahkan mingguan bila hal itu dimungkinkan untuk menjalani rapat mingguan (Ramadhani & Daulay, 2015).

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan disuku bunga PUAB diharapkan akan diikuti oleh perkembangan suku bunga deposito dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan *BI rate* apabila inflasi kedepan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan *BI rate* apabila inflasi kedepan diperkirakan berada dibawah sasaran yang telah ditetapkan (Bank Indonesia, 2013).

METODE PENELITIAN

Model Analisis

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh sektor riil dan sektor keuangan terhadap inflasi di Indonesia dengan menggunakan regresi linear berganda dengan metode *ordinary least square* (OLS). Secara matematis dinyatakan sebagai berikut (Gujarati & Porter, 2006).

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots \dots \dots (1)$$

Dalam penelitian ini, model diatas di implementasikan sebagai berikut:

$$I = \beta_0 + \beta_1 P_{\text{beras}} + \beta_2 P_{\text{oil}} + \beta_3 \text{JUB} + \beta_4 \text{RBI} + e \dots \dots \dots (2)$$

Dimana:

- I = Inflasi
- β_0 = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien masing-masing variabel
- P_{beras} = Harga beras
- P_{oil} = Harga Minyak Dunia
- JUB = Jumlah Uang Beredar
- RBI = BI *rate*
- e = *Error term*

Metode Analisis

Dalam penelitian ini, model analisis dilakukan dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dengan bantuan pengolah data sekunder menggunakan program Shazam 10.0

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk menguji distribusi data. Dalam penelitian ini Uji Jarque-Bera (JB) digunakan untuk menguji kenormalan data. Kenormalan data merupakan salah satu asumsi standar pada banyak uji-uji statistik seperti pada uji t dan uji F serta dalam pembuatan model regresi. Alasan utama mengapa asumsi kenormalan data diperlukan dalam banyak situasi karena prosedur pengujian tersebut didasari pada distribusi yang berasal dari distribusi normal. Uji normalitas menurut Jarque-Bera didasarkan pada perbandingan nilai-nilai Jarque-Bera dengan X^2 tabel dengan ketentuan yaitu: (1) jika nilai JB > X^2 tabel, maka residualnya berdistribusi tidak normal, (2) jika nilai JB < X^2 tabel, maka residualnya berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang linear diantara beberapa variabel bebas atau semua variabel bebas. Jika terjadi multikolinieritas yang serius didalam model regresi maka estimasi koefisien masing-masing variabel bebas yaitu harga beras, harga minyak dunia, jumlah uang beredar dan BI *rate* terhadap inflasi akan menyimpang (terdapat bias). Salah satu cara mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinieritas dalam model regresi dengan melihat nilai koefisien (r) antara sesama variabel bebas, dalam hal ini digunakan koefisien korelasi pearson. Apabila nilai koefisien korelasi (r) antara sesama variabel bebas lebih besar dari nilai koefisien determinasi (r^2), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolinieritas.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah korelasi antara variabel itu sendiri, pada pengamatan yang berbeda waktu atau individu. Umumnya kasus autokorelasi banyak terjadi pada data *time series*.

Autokorelasi dapat dideteksi melalui uji Durbin-Watson (DW) yang merupakan cara yang paling populer.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui homogenitas variabel yang ditimbulkan oleh variabel pengganggu. Jika timbul gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, maka akan menyebabkan hasil pengujian hipotesis menjadi tidak signifikan. Dalam penelitian ini uji gejala heteroskedastisitas dalam model regresi dilakukan dengan *ARCH TEST*.

HASIL PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Pengujian Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat *P-value* Jarque Bera pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Uji Normalitas

<i>Jarque-Berra</i>	<i>P-value</i>
1.1446	0,564

Sumber: Hasil pengolahan data, Shazam 10.0 (2016)

Hasil uji normalitas diperoleh *P-value* Jarque Bera (JB) sebesar 0,564 (56,4 persen). Nilai *P-value* Jarque Bera (JB) lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian ini terdistribusi secara normal.

Uji multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas melihat pada hubungan masing-masing variabel independen. Pengujian menunjukkan tidak terdapat gejala multikolinearitas. Hal ini dibuktikan dengan nilai korelasi antar variabel bebas di bawah 0,8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi (H_0 diterima H_a ditolak).

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi dimana dalam model regresi harus dipenuhi syarat agar tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

Tabel 2. Uji Heteroskedastisitas

<i>Heteroskedasticity Tests</i>	<i>P-value</i>
<i>ARCH TEST</i>	0,9209

Sumber: Hasil pengolahan data, Shazam 10.0 (2016)

Dalam penelitian ini, nilai heteroskedastisitasnya dilihat berdasarkan nilai *p-value* lebih besar dari 0,05 pada pengujian memiliki nilai *p-value* 0,9209 (92,09 persen) maka, H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan kata lain model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas atau homoskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi. Uji autokorelasi dilihat dari Durbin-Watson dengan hasil pengujiannya yaitu sebesar 1.7818. Berdasarkan nilai tersebut maka disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan kata lain model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

Hasil Regresi

Untuk mengetahui pengaruh sektor riil dan sektor keuangan terhadap inflasi maka dapat diteliti dengan menggunakan model analisis kuadrat terkecil yang diproses dengan menggunakan shazam. Namun variabel Jumlah Uang Beredar dihilangkan dalam model regresi karena mengakibatkan hasil regresi tidak sesuai dengan hipotesis awal sehingga regresi dilakukan hanya pada variabel Harga Beras, Harga Minyak Dunia dan BI *rate*. Berdasarkan model analisis tersebut, maka diperoleh hasil perhitungan seperti Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil Regresi Sektor Riil dan Sektor Keuangan Terhadap Inflasi

<i>Variable</i>	<i>Estimated Coefficient</i>	<i>Standard Error</i>	<i>T-Ratio</i>	<i>P-value</i>
P _{beras}	0.26935E-03	7,228	0,9226	0,376
P _{oil}	0.86390E-01	0,0005244	3,437	0,006***
RBI	1.1846	5,477	-2,805	0,017**
Constant	-9.0556	126,1	2,740	0,019**
R ²	= 0.6376		Ttabel	= 1.79588
Adj. R ²	= 0.5388		Fhitung	= 6.452
D-W	= 0.1781			

Sumber: Hasil data output Shazam 10.0, Juni 2016

Catatan:

***Signifikan pada 0,000 atau 1 persen

** Signifikan pada 0,05 atau 5 persen

Adapun persamaan linear hasil regresi diatas adalah:

$$INF = -9.0556 + 0.26935E-03 (P_{beras}) + 0.86390E-01 (P_{oil}) + 1.1846 (RBI)$$

Berdasarkan nilai koefisien regresi di atas, pengaruh dari variabel sektor riil dan sektor keuangan terhadap inflasi antara lain sebagai berikut:

1. R square (R^2) sebesar 0.6376 artinya 63,76 persen inflasi dapat dijelaskan oleh perubahan dalam variabel sektor riil dan sektor keuangan. Sedangkan sisanya 36,24 persen dijelaskan oleh faktor lain di luar model.
2. Konstanta (β_0) sebesar -9.0556 artinya apabila variabel P_{beras} , P_{oil} , dan RBI dianggap konstant (tetap) atau nol (0) dengan asumsi *ceteris paribus*, maka inflasi turun sebesar 9,05 persen.
3. Koefisien (β_1) 0.26935E-03 menjelaskan apabila terjadi kenaikan P_{beras} sebesar 1000 Rupiah maka inflasi akan mengalami kenaikan sebesar 2,6 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Dengan nilai *P-value* 0,999 lebih besar dari 0,05 maka variabel P_{beras} berpengaruh tidak signifikan secara positif terhadap inflasi. Permintaan akan beras setiap tahun terus meningkat, setidaknya harga jual beras per kg ikut berpengaruh positif terhadap inflasi di Indonesia. Akibatnya secara terpaksa pemerintah ikut campur tangan dalam pengendalian

permintaan beras dengan dua tindakan yaitu mengimpor beras dan atau meningkatkan produksi beras dalam negeri.

4. Koefisien (β_2) sebesar 0.86390E-01 menjelaskan apabila terjadi kenaikan P_{oil} sebesar 10 Dollar per barel maka inflasi akan mengalami peningkatan sebesar 8,63 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Dengan nilai *P-value* 0.082 lebih besar dari 0,05, maka variabel P_{oil} berpengaruh tidak signifikan secara positif terhadap inflasi. Pengaruh permintaan minyak melebihi dari kemampuan negara dalam men-*supply* kebutuhan dasar sektor industri untuk beroperasi menciptakan barang dan jasa memunculkan kebijakan impor minyak. Efek impor memberikan dampak peningkatan inflasi jika nilai mata uang rupiah terus merosot atau depresiasi terhadap USD. Bila diasumsi 10 Dollar per barel dengan 10000 Rupiah per USD, kemudian terjadi perubahan 100 Rupiah terhadap USD maka dibutuhkan 10.100 Rupiah untuk membeli barel yang sama. Dampaknya, produsen akan menghitung kenaikan tersebut sebagai biaya (*cost*) tambahan yang nantinya dikenakan pada barang maupun jasa dan hasil akhirnya terjadi kenaikan harga-harga barang atau inflasi.
5. Koefisien (β_3) yakni 1.1846 menjelaskan apabila terjadi kenaikan RBI sebesar 1 persen maka inflasi akan mengalami kenaikan sebesar 1,18 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Dengan nilai *P-value* 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka variabel RBI berpengaruh signifikan secara positif terhadap inflasi. Hasil estimasi variabel *BI Rate* berlawanan dengan hipotesis awal yaitu berpengaruh negatif. Ini memberi sinyal bahwa teori kebijakan pengendalian inflasi yakni suku bunga naik maka inflasi akan turun tidak terjadi sebab suku bunga akan berdampak kenaikan lagi bila diasumsikan suku bunga naik 1 persen hasilnya inflasi naik 1,18 persen. *BI Rate* atau suku bunga kebijakan Bank Indonesia merupakan suku bunga patokan bagi suku bunga pinjaman maupun simpanan bagi bank-bank atau lembaga keuangan lainnya diseluruh Indonesia. Patokan ini hanya bersifat rujukan dan bukan merupakan kewajiban sehingga para bank bisa saja menaikkan bunga pinjaman kepada orang yang mengajukan kredit dengan alasan *BI Rate* naik namun di sisi lain suku bunga deposito atau tabungan malah tidak naik sama sekali.
6. Secara simultan dari hasil F-hitung yakni 6.452 atau *P-value* 0,009 < 0,05 menunjukkan variabel harga beras, harga minyak dunia, dan suku bunga BI secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan pendekatan *ordinary least square* (OLS), maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang berasal dari sektor riil yaitu Harga Beras dan Harga Minyak Dunia selama periode penelitian (2000-2014) berpengaruh dalam penciptaan inflasi di Indonesia namun tidak signifikan.
2. Sementara di sektor keuangan, variabel *BI Rate* selama periode penelitian lebih berpengaruh dan signifikan dalam penciptaan inflasi di Indonesia. Hal ini akibat adanya ketidaksamaan penggunaan tingkat suku bunga yang ditentukan oleh Bank Sentral terhadap suku bunga PUAB dengan penggunaan tingkat suku bunga yang digunakan oleh bank-bank umum baik tingkat suku bunga kredit maupun tingkat suku bunga pinjaman. Akibatnya jumlah uang beredar dimasyarakat yang baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap inflasi tidak benar-benar efektif dapat dikendalikan melalui penggunaan tingkat suku bunga.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat penulis kemukakan diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam upaya pengendalian inflasi di Indonesia, diharapkan adanya kerja sama yang saling terkait terutama pemerintah dengan pengusaha yang berperan dalam penyedia barang dan jasa kebutuhan masyarakat Indonesia secara umum.
2. Melihat hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *BI Rate* berpengaruh secara positif terhadap inflasi di Indonesia maka disarankan pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai otoritas moneter lebih berhati-hati dalam menggunakan kebijakan suku bunga acuan (*BI Rate*) sebagai instrumen utama dalam mengendalikan inflasi di Indonesia. Pastikan semua kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter dalam penetapan suku bunga mampu direspon oleh bank-bank umum dalam melakukan perubahan terhadap suku bunga bank umum, agar kebijakan tersebut benar-benar efektif dilakukan dalam pengendalian inflasi di Indonesia.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain selain keempat variabel yang digunakan dalam penelitian ini serta penambahan kurun waktu agar dapat dijadikan bahan perbandingan dan pertimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2013, Mei 7). *Bank Indonesia*. Dipetik Mei 19, 2016, dari Bank Indonesia Web Site: www.bi.go.id.
- Gujarati, D., & Porter, D. C. (2006). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Hasibuan, J. (2009). *Analisis Indeks Harga Konsumen Terhadap Indeks Harga Sandang dan Pangan Kota Medan*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Kadiman, I. (2005). *Teori dan Indikator Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Maggi, R., & Saraswati, B. D. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia: Model Demand Pull Inflation. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 6 (2), 71-77.
- Mankiw, N. G. (2006). *Makroekonomi Edisi ke Enam*. Jakarta: Erlangga
- Mishkin, F. S. (2001). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. Columbia: Pearson Education.
- Ramadhani, R., & Daulay, M. (2015). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transaksi Berjalan Indonesia Periode 2006-2013. *Ekonomi dan Keuangan*, 2 (10), 634-644.
- Saputra, K. (2013). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia 2007-2012*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sukirno, S. (2004). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sukirno, S. (2013). *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

Suryana. (2000). *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat.

Sutawijaya, A., & Zulfahmi. (2015). Pengaruh Faktor-faktor Ekonomi Terhadap Inflasi di Indonesia. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 8 (2), 85-101.